

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki, A. S. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Agus Dwiyanto, d. (2007). *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Anderson, B. R. (1984). Gagasan Tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa. In M. Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (pp. 44-127). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andreastuti, D. (2014, July). Analisis Kepemimpinan Partisipatif dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *JSP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.18 No.1*, 15-25.
- Antlov, H. (2002). *Negara dalam Desa - Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Antlov, H. (2003). Kerangka Hukum Pemerintahan Desa: Menurut UU No. 22 Tahun 1999. *Jurnal Forum Inovasi*.
- Azhari, A. F. (2005). *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Azwardi, S. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, No.1*, 29-41.
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. XXII/Edisi HUT Ke-70 RI/2015*.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi BPPKD.
- CNN Indonesia. (2019, November 08). *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108211147-12-446809/icw-sebut-korupsi-dana-desa-dampak-dari-pengawasan-yang-buruk>.
- Creswell, J. W. (4th ed). *Reaserch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Darmawan, A. E. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul). *Skripsi UGM*.
- Dhani, A. (2017, August 16). *Dana Desa di Era Jokowi*. Retrieved Mei 3, 2020, from Tirto.id: <https://tirto.id/dana-desa-di-era-jokowi-cuGE>

- Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri. (2019, November 26). *Workshop Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri:  
[http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/workshop\\_permendagri\\_nomor\\_20\\_tahun\\_2018\\_tentang](http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/workshop_permendagri_nomor_20_tahun_2018_tentang)
- DJPK. (2016, December 7). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- DJPK. (2019). *Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2019*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:  
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?s=rincian+alokasi+dana+desa+tahun+2019>
- DJPK. (2019). *Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019*. Retrieved from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:  
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>
- DJPK. (2019). *Rincian Dana Desa tahun 2020*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gill, R. (2009). *Theory and Practice of Leadership*. London: SAGE.
- Isedion, R. A. (2021). Democracy, Good Governance and Political Leadership Misconception in Nigeria. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 21838-21844.
- Joeliono, D. (n.d.). *KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PENGUATAN OTONOMI DESA ( Studi Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas )*. Retrieved April 27, 2020, from Portal Resmi Kabupaten Banyumas:  
<https://www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi-desa#.XrOIQPZuLIU>
- Kabul Setio Utomo, S. D. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publiik Vol.13 Nomor 1*, 50-66.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8 No 1*.

- Kartono, K. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemendagri. (2014). *Perkembangan Paradigma Good Governance*. Retrieved from Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset: Yogyakarta.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).
- Pertana, P. R. (2019, Mar 26). *Total Dana Desa sejak 2015 Capai Rp 275 Triliun*. Retrieved April 27, 2020, from detikFinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4483895/total-dana-desa-sejak-2015-capai-rp-275-triliun>
- Purwo Santoso, d. (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rifai, A. (2010). *Teori Sifat Hakikat Negara*. Malang: Penerbit Tunggal Mandiri Publishing.
- Rompas, R. M. (2010). *Kreasi Good Governance Suatu Eksoterik Mutlak*. Jakarta: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.
- Rufus Aisedion, O. G. (2021, October 23). Democracy, Good Governance and Political Leadership Misconception in Nigeria. *Social Sciences and Humanities*, pp. 21838-21844.
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saraswati, Y. (2019). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri*. *Tesis PascaSarjana UGM*.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Seftiawan, D. (2018). *Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019*. Retrieved September 29, 2019, from [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com)
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Silahuudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Jakarta: Setara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukasmanto. (2004). Good Governance dan Isu-Isu Politik Anggaran Desa dan Kabupaten. In A. R. AAGN. Ari Dwipayana, *Promosi Otonomi Desa* (pp. 71-90). Yogyakarta: IRE Press.
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supartdi, M. (2006). *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Usman, P. D. (2019). *Kepemimpinan Efektif (Teori, Penelitian & Praktik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Ward Barendschot, W. C. (2021). A quiet revolution? Village head elections and the democratization of rural Indonesia. *Critical Asian Studies*, 126-146.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafitindo Persada.
- Yukl, G. A. (2001). *Kepemimpinan dalam Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Yukl, G. A. (2013). *Leadership in Organizations, 8th Edition*. England: Pearson.
- Yulianto, T. P. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No 1*, 1-14.
- Yunus, Y. (2006). Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan Good Governance. *Demokrasi Vol. V No.1*, 82.

Undang-Undang :

- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
- Permendes No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018
- Perda Kabupaten Pemalang No 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- Perbup No 87 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2019
- Keputusan Kepala Desa Karangdawa Nomor 930/2/Tahun 2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019